

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 18 TAHUN 2026
TANGGAL
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN
GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG RASIO
INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS
MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK
UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

RINCIAN SUMBER DATA PERHITUNGAN RIM, RIM SYARIAH, GIRO RIM, DAN GIRO RIM SYARIAH

TABEL 1
RINCIAN DATA UNTUK PERHITUNGAN RIM

| Komponen | Kelompok Informasi (KI) | Rincian Kelompok Informasi (Dimensi) | Keterangan |
|----------|---|--|------------|
| Kredit | KI Keuangan - Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian* | 1. Pos Laporan Posisi Keuangan: Kredit Non-Bank (01.09.01.02.00.00) 2. Bank Pelapor: BUK Nilai Kredit yang digunakan adalah nilai pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri – Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDLX). Dalam hal nilai pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri – Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDLX) adalah 0 (nol) maka nilai yang digunakan adalah nilai informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri – Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDX). | Jumlah |
| | KI Data Pokok - Data Pokok Pelapor | | |
| DPK | KI Keuangan - Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian* | 3. Pos Laporan Posisi Keuangan: a. Giro (02.01.00.00.00.00) b. Tabungan (02.02.00.00.00.00) c. Deposito (02.03.00.00.00.00) | Jumlah |
| | KI Data Pokok - Data Pokok Pelapor | | |

| Komponen | Kelompok Informasi (KI) | Rincian Kelompok Informasi (Dimensi) | Keterangan |
|--|---|---|-----------------|
| | | 2. Bank Pelapor: BUK Nilai DPK BUK yang digunakan adalah nilai pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri – Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDLX). Dalam hal nilai pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri – Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDLX) adalah 0 (nol) maka nilai yang digunakan adalah nilai informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri – Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDX). | |
| Surat Berharga Korporasi yang Dimiliki | Laporan <i>Offline</i> ** | Kriteria mengacu pada Pasal 14 PADG ini. | Harga Perolehan |
| | KI Keuangan - Surat Berharga yang Dimiliki <ul style="list-style-type: none"> ○ KI Data Pokok - Data Pokok Pelapor ○ KI Data Pokok - Data Pihak Lawan | 1. Jenis Surat Berharga: <ul style="list-style-type: none"> a. Obligasi Korporasi – Subordinasi (F0415010501)*** b. Obligasi Korporasi – Non Subordinasi (F0415010602)*** c. Sukuk Korporasi – Subordinasi (F0415020601)*** d. Sukuk Korporasi – Non Subordinasi (F0415020602)*** e. Promes/Aksep (F0408) f. Surat Berharga Komersial (F041001) g. Surat Berharga Komersial Syariah (F041002) h. <i>Medium Term Notes</i> (F041101) i. <i>Floating Rate Notes</i> (F0412) j. <i>Credit Linked Notes</i> (F0413) k. Dana Investasi Real Estate (F0416) l. Efek Beragun Aset (F041701) m. Efek Beragun Aset Syariah (F041702) n. <i>Long Term Notes</i>**** 2. Golongan Pihak Lawan: Penduduk (S1), selain sandi S121, S126014L, S128014L, S122, S13, S14, S15, dan S199L | |

| Komponen | Kelompok Informasi (KI) | Rincian Kelompok Informasi (Dimensi) | Keterangan |
|---------------------------------|--|---|-----------------|
| | | 3. Jenis Penawaran: <i>Public Offering</i> (1) dan <i>Private Placement</i> (2) 4. Peringkat Surat Berharga: peringkat investasi terendah dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK sebagaimana dalam pedoman penyusunan LBUT 5. Lembaga pemeringkat: lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK sebagaimana dalam pedoman penyusunan LBUT 6. Status Registrasi: Teregistrasi (1) 7. Jenis Kegiatan Operasional Bank: BUK Keterangan: 1. Jenis surat berharga berupa obligasi korporasi dan sukuk korporasi menggunakan data yang bersumber dari LBUT sejak data periode akhir bulan November 2026. Sebelum periode data tersebut, data yang digunakan berasal dari laporan <i>offline</i> . 2. Golongan Pihak Lawan bersumber dari Kelompok Informasi Data Pokok – Data Pihak Lawan. | |
| | KI Keuangan - Surat Berharga yang Dimiliki | Wesel | Harga Perolehan |
| | KI Data Pokok - Data Pokok Pelapor | 1. Jenis Surat Berharga: a. Wesel Ekspor (F040901) b. Wesel - Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (F040902) 2. Jenis Kegiatan Operasional Bank: BUK | |
| Surat Berharga yang Diterbitkan | Laporan <i>Offline</i> ** | Kriteria mengacu pada Pasal 17 PADG ini. | Nominal |
| | KI Keuangan - Surat Berharga yang Diterbitkan | 1. Jenis Surat Berharga: a. <i>Medium Term Notes</i> (F041101)*** b. <i>Floating Rate Notes</i> (F0412)*** | |
| | o KI Data Pokok - Data Pokok Pelapor o KI Data Pokok - Data Pihak Lawan | | |

| Komponen | Kelompok Informasi (KI) | Rincian Kelompok Informasi (Dimensi) | Keterangan |
|----------|-------------------------|---|------------|
| | | <p>c. Obligasi Korporasi - Non Subordinasi (F0415010602)***</p> <p>d. Surat Berharga Komersial (F041001)</p> <p>e. Promes/Aksep (F0408)</p> <p>f. <i>Credit Linked Notes</i> (F0413)</p> <p>g. Efek Beragun Aset (F041701)</p> <p>h. <i>Long Term Notes</i>****</p> <p>2. Pengakuan dalam KPMM: Tidak Diperhitungkan dalam KPMM (NM)</p> <p>3. Golongan Pihak Lawan: Pihak ketiga Bukan Bank, baik penduduk dan bukan penduduk</p> <p>4. Jenis Penawaran: <i>Public Offering</i> (1) dan <i>Private Placement</i> (2)</p> <p>5. Peringkat Surat Berharga: peringkat investasi terendah dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK sebagaimana dalam pedoman penyusunan LBUT</p> <p>6. Lembaga pemeringkat: lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK sebagaimana dalam pedoman penyusunan LBUT</p> <p>7. Status Registrasi: Teregistrasi (1)</p> <p>8. Jenis Kegiatan Operasional Bank: BUK</p> <p>Keterangan:</p> <p>1. Jenis surat berharga berupa <i>medium term notes, floating rate notes, dan obligasi korporasi menggunakan data yang bersumber dari LBUT</i> sejak data periode akhir bulan November 2026. Sebelum periode data tersebut, data yang digunakan berasal dari laporan <i>offline</i>.</p> <p>2. Golongan Pihak Lawan bersumber dari Kelompok Informasi Data Pokok – Data Pihak Lawan.</p> | |

| Komponen | Kelompok Informasi (KI) | Rincian Kelompok Informasi (Dimensi) | Keterangan |
|---|--|---|----------------------|
| Pinjaman yang Diterima | KI Keuangan – Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima | 1. Jenis Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima: Bilateral (B) dan Sindikasi (D) 2. Pengakuan dalam KPMM: Tidak Diperhitungkan dalam KPMM (NM) 3. Golongan Kreditur/Golongan Pihak Lawan: Bank Negara Kreditur/Negara Pihak Lawan: selain Indonesia (selain ID) 4. Golongan Kreditur/Golongan Pihak Lawan: Pihak ketiga Bukan Bank Negara Kreditur/ Negara Pihak Lawan: seluruh negara 5. Sisa jangka waktu ≥ 1 (satu) tahun (tanggal jatuh tempo dikurangi tanggal akhir bulan laporan) 6. Jenis Kegiatan Operasional Bank: BUK Keterangan: Golongan Kreditur/Golongan Pihak Lawan dan Negara Kreditur/Negara Pihak Lawan bersumber dari Kelompok Informasi Data Pokok – Data Pihak Lawan. | Jumlah Bulan Laporan |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ KI Data Pokok - Data Pokok Pelapor ○ KI Data Pokok - Data Pihak Lawan | | |
| Pinjaman yang Diterima Kantor Cabang Bank Luar Negeri | Laporan <i>Offline</i> ** | Dilaporkan oleh Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dengan kriteria pinjaman yang diterima mengacu pada Pasal 18 PADG ini. | Jumlah Bulan Laporan |
| | KI Keuangan – Liabilitas Antar Kantor*** <ul style="list-style-type: none"> ○ KI Data Pokok - Data Pokok Pelapor*** ○ KI Data Pokok - Data Pihak Lawan*** | 1. Status Kantor: Kantor Pusat (KP) dan Kantor Cabang (KC) 2. Negara: selain Indonesia (selain ID) 3. Jenis Instrumen: Pinjaman dengan <i>remaining maturity</i> ≥ 1 tahun (F0501) 4. Jenis Kegiatan Operasional Bank: BUK Keterangan: Negara Pihak Lawan bersumber dari Kelompok Informasi Data Pokok – Data Pihak Lawan. | Jumlah Bulan Laporan |

| Komponen | Kelompok Informasi (KI) | Rincian Kelompok Informasi (Dimensi) | Keterangan |
|---|--|--|--|
| Total Kredit untuk Rasio NPL | KI Keuangan - Kredit/Pembiayaan | 1. Golongan Pihak Lawan: Pihak ketiga Bukan Bank 2. Jenis Kegiatan Operasional Bank: BUK | Jumlah |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ KI Data Pokok - Data Pokok Pelapor ○ KI Data Pokok - Data Pihak Lawan | | |
| Kredit Bermasalah untuk Rasio NPL | KI Keuangan - Kredit/Pembiayaan | 1. Golongan Pihak Lawan: Pihak Ketiga Bukan Bank 2. Kualitas: Kurang Lancar (3), Diragukan (4), Macet (5) 3. Jenis Kegiatan Operasional Bank: BUK | Jumlah |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ KI Data Pokok - Data Pokok Pelapor ○ KI Data Pokok - Data Pihak Lawan | | |
| KPMM | OJK | - | Data diperoleh dari OJK |
| Dana Pihak Ketiga Rupiah untuk Giro RIM | KI Risiko - Dana Pihak Ketiga untuk Kewajiban Giro Wajib Minimum | 1. Pos Dana Pihak Ketiga untuk pemenuhan Giro Wajib Minimum: Giro (F09), Tabungan (F10), Deposito (F11), Liabilitas Lainnya (F25) 2. Kegiatan Operasional Bank: BUK | Jumlah Rupiah (Rata - Rata 2 Periode Pelaporan Mingguan) |
| | KI Data Pokok - Data Pokok Pelapor | | |

*) Laporan Posisi Keuangan Harian menggunakan posisi tanggal 15 dan tanggal akhir bulan. Dalam hal tanggal Laporan Posisi Keuangan Harian jatuh pada hari libur, maka menggunakan data posisi hari kerja terakhir sebelum hari libur.

**) Berlaku sampai dengan laporan posisi data akhir bulan Oktober 2026.

***) Berlaku mulai laporan posisi data akhir bulan November 2026.

****) Dalam hal belum terdapat sandi yang tersedia untuk *Long Term Note* maka pencatatan *Long Term Note* dapat menggunakan sandi yang tersedia untuk *Medium Term Note*.

TABEL 2
RINCIAN DATA UNTUK PERHITUNGAN RIM SYARIAH

| Komponen | Kelompok Informasi (KI) | Rincian Kelompok Informasi | Keterangan |
|--|---|---|-----------------|
| Pembiayaan | KI Keuangan - Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian* | 1. Pos Laporan Posisi Keuangan: Pembiayaan Non-Bank (01.09.02.02.00.00) 2. Bank Pelapor: a. BUS b. UUS Nilai Pembiayaan yang digunakan adalah nilai pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri (GDL). Dalam hal nilai pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri (GDL) adalah 0 (nol) maka nilai yang digunakan adalah nilai informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri (GD). | Jumlah |
| | KI Data Pokok - Data Pokok Pelapor | | |
| DPK | KI Keuangan - Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian* | 1. Pos Laporan Posisi Keuangan: a. Giro (02.01.00.00.00.00) b. Tabungan (02.02.00.00.00.00) c. Deposito (02.03.00.00.00.00) 2. Bank Pelapor: a. BUS b. UUS Nilai DPK BUS atau DPK UUS yang digunakan adalah nilai pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri (GDL). Dalam hal nilai pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri (GDL) adalah 0 (nol) maka nilai yang digunakan adalah nilai informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri (GD). | Jumlah |
| | KI Data Pokok - Data Pokok Pelapor | | |
| Surat Berharga Syariah Korporasi yang Dimiliki | Laporan <i>Offline</i> ** | Kriteria mengacu pada Pasal 28 PADG ini. | Harga Perolehan |
| | KI Keuangan - Surat Berharga yang Dimiliki | 1. Jenis Surat Berharga: a. Sukuk Korporasi – Non Subordinasi (F0415020602)*** | |
| | KI Data Pokok - Data Pokok Pelapor | | |

| Komponen | Kelompok Informasi (KI) | Rincian Kelompok Informasi | Keterangan |
|----------|--|--|-----------------|
| | | b. Sukuk Korporasi – Subordinasi (F0415020601)*** c. Promes/Aksep (F0408) d. Surat Berharga Komersial Syariah (F041002) e. <i>Medium Term Notes</i> Syariah (F041102) f. Efek Beragun Aset Syariah (F041702) 2. Golongan Pihak Lawan: Penduduk (S1), selain sandi S121, S126014L, S128014L, S122, S13, S14, S15, dan S199L 3. Jenis Penawaran: <i>Public Offering</i> (1) dan <i>Private Placement</i> (2) 4. Peringkat Surat Berharga: peringkat investasi terendah dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK sebagaimana dalam pedoman penyusunan LBUT 5. Lembaga pemeringkat: lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK sebagaimana dalam pedoman penyusunan LBUT 6. Status Registrasi: Teregistrasi (1) 7. Jenis Kegiatan Operasional Bank: BUS, UUS Keterangan: 1. Jenis surat berharga berupa sukuk korporasi menggunakan data yang bersumber dari LBUT sejak data periode akhir bulan November 2026. Sebelum periode data tersebut, data yang digunakan berasal dari laporan <i>offline</i> . 2. Golongan Pihak Lawan bersumber dari Kelompok Informasi Data Pokok – Data Pihak Lawan. | |
| | KI Keuangan - Surat Berharga yang Dimiliki | Wesel: | Harga Perolehan |
| | KI Data Pokok - Data Pokok Pelapor | 1. Jenis Surat Berharga: a. Wesel Ekspor (F040901) b. Wesel - Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (F040902) 2. Jenis Kegiatan Operasional Bank: BUS, UUS | |

| Komponen | Kelompok Informasi (KI) | Rincian Kelompok Informasi | Keterangan |
|---|---|---|------------|
| Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan | Laporan <i>Offline</i> ** | Kriteria mengacu pada Pasal 31 PADG ini. | Nominal |
| | KI Keuangan - Surat Berharga yang Diterbitkan | 1. Jenis Surat Berharga: a. <i>Medium Term Notes</i> Syariah (F041102)*** b. Sukuk Korporasi – Non Subordinasi (F0415020602)*** c. Promes/Aksep (F0408) d. Surat Berharga Komersial Syariah (F041002) e. Efek Beragun Aset Syariah (F041702) 2. Pengakuan dalam KPMM: Tidak Diperhitungkan dalam KPMM (NM) 3. Golongan Pihak Lawan: Pihak ketiga Bukan Bank, baik penduduk dan bukan penduduk 4. Jenis Penawaran: <i>Public Offering</i> (1) dan <i>Private Placement</i> (2) 5. Peringkat Surat Berharga: peringkat investasi terendah dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK sebagaimana dalam pedoman penyusunan LBUT 6. Lembaga pemeringkat: lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK sebagaimana dalam pedoman penyusunan LBUT 7. Status Registrasi: Teregistrasi (1) 8. Jenis Kegiatan Operasional Bank Pelapor: BUS, UUS Keterangan: 1. Jenis surat berharga berupa medium term notes syariah dan sukuk korporasi menggunakan data yang bersumber dari LBUT sejak data periode akhir bulan November 2026. Sebelum periode data tersebut, data yang digunakan berasal dari laporan <i>offline</i> . 2. Golongan Pihak Lawan bersumber dari Kelompok Informasi Data Pokok – Data Pihak Lawan. | |
| | KI Data Pokok - Data Pokok Pelapor | | |

| Komponen | Kelompok Informasi (KI) | Rincian Kelompok Informasi | Keterangan |
|---|--|---|----------------------|
| Pembiayaan yang Diterima | KI Keuangan – Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima | Komponen: 1. Jenis Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima: Bilateral (B) dan Sindikasi (D) 2. Pengakuan dalam KPMM: Tidak Diperhitungkan dalam KPMM (NM) 3. Golongan Kreditur/Golongan Pihak Lawan: Bank Negara Kreditur/Negara Pihak Lawan: selain Indonesia (selain ID) 4. Golongan Kreditur/Golongan Pihak Lawan: Pihak ketiga Bukan Bank Negara Kreditur/ Negara Pihak Lawan: seluruh negara 5. Sisa jangka waktu ≥ 1 (satu) tahun (tanggal jatuh tempo dikurangi tanggal akhir bulan laporan) 6. Jenis Kegiatan Operasional Bank: BUS, UUS Keterangan: Golongan Kreditur/Golongan Pihak Lawan dan Negara Kreditur/Negara Pihak Lawan bersumber dari Kelompok Informasi Data Pokok – Data Pihak Lawan. | Jumlah Bulan Laporan |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ KI Data Pokok - Data Pokok Pelapor ○ KI Data Pokok - Data Pihak Lawan | | |
| Pembiayaan yang Diterima Kantor Cabang Bank Luar Negeri | Laporan <i>Offline</i> ** | Dilaporkan oleh Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dengan kriteria pembiayaan yang diterima sesuai dengan Pasal 32 PADG ini. | Jumlah Bulan Laporan |
| | KI Keuangan – Liabilitas Antar Kantor*** <ul style="list-style-type: none"> ○ KI Data Pokok - Data Pokok Pelapor*** ○ KI Data Pokok - Data Pihak Lawan*** | 1. Status Kantor: Kantor Pusat (KP) dan Kantor Cabang (KC) 2. Negara Pihak Lawan: selain Indonesia (selain ID) 3. Jenis Instrumen: Pinjaman dengan <i>remaining maturity</i> ≥ 1 tahun (F0501) 4. Jenis Kegiatan Operasional Bank: UUS Keterangan: Negara Pihak Lawan bersumber dari Kelompok Informasi Data Pokok – Data Pihak Lawan. | Jumlah Bulan Laporan |

| Komponen | Kelompok Informasi (KI) | Rincian Kelompok Informasi | | Keterangan |
|----------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Total Pembiayaan untuk Rasio NPF | KI Keuangan - Kredit/Pembiayaan | Jenis Akad: Piutang <i>Murabahah</i> (070) | a. Golongan Pihak Lawan: Pihak ketiga Bukan Bank b. Jenis Kegiatan Operasional Bank: BUS, UUS | Saldo Harga Pokok |
| | | Jenis Akad: <i>Ishtishna'</i> (080) | | Saldo Harga Pokok |
| | | Jenis Akad: <i>Qardh</i> (100) | | Jumlah |
| | | Jenis Akad: <i>Mudharabah</i> (020), <i>Mudharabah Muqayyadah</i> (025), <i>Musyarakah</i> (030), <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> (035), Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya (119) | | Jumlah |
| | | Jenis Akad: Ijarah (040) dan Ijarah <i>Muntahiyyan Bittamlik</i> (045) | | Harga perolehan - (akumulasi penyusutan/ amortisasi + cadangan kerugian penurunan nilai aset ijarah) + tunggakan pokok |
| | | Jenis Akad: Multijasa - Pendidikan (061), Multijasa - Ibadah (062), Multijasa - Kesehatan (063), Multijasa - Pernikahan (064), Multijasa - Lainnya (069) | | Saldo Harga Pokok |

| Komponen | Kelompok Informasi (KI) | Rincian Kelompok Informasi | | Keterangan |
|---|---|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">○ KI Data Pokok - Data Pokok Pelapor○ KI Data Pokok - Data Pihak Lawan | | | |
| Total Pembiayaan Bermasalah untuk Rasio NPF | KI Keuangan - Kredit/Pembiayaan | Jenis Akad: Piutang <i>Murabahah</i> (070) | Komponen: a. Golongan Pihak Lawan: Pihak Ketiga Bukan Bank b. Kualitas: Kurang Lancar (3), Diragukan (4), Macet (5) c. Jenis Kegiatan Operasional Bank: BUS, UUS | Saldo Harga Pokok |
| | | Jenis Akad: <i>Ishtishna'</i> (080) | | Saldo Harga Pokok |
| | | Jenis Akad: <i>Qardh</i> (100) | | Jumlah |
| | | Jenis Akad: <i>Mudharabah</i> (020), <i>Mudharabah Muqayyadah</i> (025), <i>Musyarakah</i> (030), <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> (035), Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya (119) | | Jumlah |
| | | Jenis Akad: Ijarah (040) dan Ijarah <i>Muntahiyyan Bittamlik</i> (045) | | Harga perolehan - (akumulasi penyusutan/ amortisasi + cadangan kerugian penurunan nilai aset ijarah) + tunggakan pokok |
| | | Jenis Akad: Multijasa - Pendidikan (061), Multijasa - Ibadah (062), Multijasa - Kesehatan (063), Multijasa - | | Saldo Harga Pokok |

| Komponen | Kelompok Informasi (KI) | Rincian Kelompok Informasi | | Keterangan |
|---|--|---|--|--|
| | | Pernikahan (064), Multijasa - Lainnya (069) | | |
| | o KI Data Pokok - Data Pelapor o KI Data Pokok - Data Pihak Lawan | | | |
| KPMM | OJK | - | | Data diperoleh dari OJK |
| Dana Pihak Ketiga Rupiah untuk Giro RIM Syariah | KI Risiko - Dana Pihak Ketiga untuk Kewajiban Giro Wajib Minimum | 1. Pos Dana Pihak Ketiga untuk pemenuhan Giro Wajib Minimum: Giro (F09), Tabungan (F10), Deposito (F11), Liabilitas Lainnya (F25) 2. Kegiatan Operasional Bank: BUS, UUS | | Jumlah Rupiah (Rata - Rata 2 Periode Pelaporan Mingguan) |
| | KI Data Pokok - Data Pokok Pelapor | | | |

*) Laporan Posisi Keuangan Harian menggunakan posisi tanggal 15 dan tanggal akhir bulan. Dalam hal tanggal Laporan Posisi Keuangan Harian jatuh pada hari libur, maka menggunakan data posisi hari kerja terakhir sebelum hari libur.

**) Berlaku sampai dengan laporan posisi data akhir bulan Oktober 2026.

***) Berlaku mulai laporan posisi data akhir bulan November 2026.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DESTRY DAMAYANTI